



PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 1180/VIII/TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan usulan Perangkat Daerah/ Unit Kerja untuk ditindaklanjuti bersama pada Tahun Anggaran 2025
- KETIGA : Dalam hal tertentu yang dipandang perlu dan mendesak untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah meskipun tidak termasuk dalam agenda Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Perangkat Daerah/ Unit Kerja pengusul atau terkait langsung secara substansi dengan agenda Rencana Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah tersebut, agar segera mempersiapkan pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan mengoordinasikan bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan melibatkan Tenaga Ahli/Unsur terkait lainnya yang dipandang perlu, dan memperhatikan tahapan/ mekanismenya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibebankan pada DPA-Perangkat Daerah/ Unit Kerja Pemrakarsa dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1010/VII/TAHUN 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Provinsi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan **scan** pada **QR Code**.

Sulawesi Selatan Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 13 Agustus 2025

an.GUBERNUR SULAWESI SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,



JUFRI RAHMAN

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Selatan;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan;
3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri;
4. Para Kepala Perangkat Daerah dan Biro Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Kepala Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Selatan.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 1180/VIII/TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025

No (1)	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD/Unit Kerja (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
1.	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 147 Tahun 2017 Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan		v			BKAD	2025	
2.	Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		v			BKAD	2025	
3.	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025		v			BKAD	2025	
4.	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum	Pedoman dalam pengelolaan JDIH di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	v			Biro Hukum	2025	
5.	Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan	Struktur Organisasi dan tugas serta fungsi Komisi	v			Diskominfo	2025	

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat divalidasi keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



No (1)	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD/Unit Kerja (6)	TARGET PENYAMPALAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
6.	Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan		v			Diskominfo	2025	
7.	Tim Percepatan Pembangunan, Staf Khusus, dan Tim Pendamping Gubernur dan Wakil Gubernur		v			Bappelitbangda	2025	
8.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2026		v			Bappelitbangda	2025	
9.	Perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025		v			Bappelitbangda	2025	
10.	Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 136 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis Integrasi ke Program Jaminan Kesehatan Nasional		v			Dinas Kesehatan	2025	
11.	Pola Tata Kelola, Rencana Strategis, dan Standar Pelayanan Minimal Unit Teknis Pelaksanaan Pengembangan Sumber Benih dan Produksi Tanaman Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		v			Dinas TPHBUN	2025	
12.	Pola Tata Kelola, Rencana Strategis, dan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksanaan Teknis Kebun Rawa		v			DLHK	2025	

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat divalidasi keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



No (1)	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD/Unit Kerja (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
	Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan							
13.	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Badan Layanan Umum Daerah		v			Biro Ekbang	2025	
14.	Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat		v			Bapenda	2025	
15.	Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru		v			Dinas Pendidikan	2025	
16.	Pembinaan Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer		v			Dinas Kesehatan	2025	
17.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah	Perubahan beberapa ketentuan yang mengatur susunan organisasi, tugas, fungsi, uraian tugas, serta tata kerja beberapa Perangkat Daerah		v		Biro Organisasi Setda Provinsi Sulsel	2025	
18.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan.	Perubahan Lampiran yang mengatur UPT D SMAN (Pembentukan UPTD SMAN).		v	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan	Biro Organisasi Setda Provinsi Sulsel	2025	

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat divalidasi keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



No (1)	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD/Unit Kerja (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
					Dasar dan Menengah.			
19.	Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah		v			Diskominfo	2025	
20.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Strategis Provinsi Pusat Bisnis Terpadu		v			Dinas SDACKTR	2025	
21.	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Provinsi Sulawesi Selatan		v			Dinas SDACKTR	2025	
22.	Peraturan Pelaksanaan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pertanian Organik		v			Dinas Ketapang	2025	
23.	Nilai Perolehan Air Tanah		v			Dinas ESDM	2025	
24.	Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan bagi Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan	Memberikan akses bagi perangkat daerah untuk dapat melakukan verifikasi data dan validasi data kependudukan dengan pemberian akses melalui perjanjian kerja sama	v			Disdukcapil	2025-2026	

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
- Dokumen ini telah didasarkan secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



No (1)	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD/Unit Kerja (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
25.	Tim Percepatan Pembangunan, Staf Khusus, dan Tim Pendamping Gubernur dan Wakil Gubernur	Tenaga pendukung/ pendamping Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bertugas untuk membantu Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah	v			Bappelitbangda	2025	
26.	Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara	Pemberian tambahan penghasilan bagi aparatur sipil negara	v			BKD	2025	
27.	Pemanfaatan Pajak Rokok		v			Bapenda	2025	
28.	Pedoman Pembagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan		v			Bapenda	2025	
29.	Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Atas Air		v			Bapenda	2025	
30.	Detail Rincian Objek dan Tarif Atas Pelayanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji		v			Bapenda	2025	
31.	Detail Rincian Objek dan Tarif Atas Pelayanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit		v			Bapenda	2025	

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1. Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat divalidasi dengan melakukan scan pada QR Code



No (1)	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD/Unit Kerja (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
32.	Detail Rincian Objek dan Tarif Atas Pelayanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat		v			Bapenda	2025	
33.	Detail Rincian Objek dan Tarif Atas Pelayanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi		v			Bapenda	2025	
34.	Detail Rincian Objek dan Tarif Atas Pelayanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah		v			Bapenda	2025	
35.	Detail Rincian Objek dan Tarif Atas Pelayanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Khusus Daerah Gigi dan Mulut		v			Bapenda	2025	
36.	Detail Rincian Objek dan Tarif Atas Pelayanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi		v			Bapenda	2025	
37.	Detail Rincian Objek dan Tarif Atas Pelayanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Regional La Mappapenning Bone		v			Bapenda	2025	

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



No (1)	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD/Unit Kerja (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
38.	Detail Rincian Objek dan Tarif Atas Pelayanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah pada Laboratorium Kesehatan Daerah		v			Bapenda	2025	
39.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Antar Desa dengan Desa di Lain Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Lintas Kabupaten/Kota)	Mengubah beberapa ketentuan sebagai tindak lanjut dari perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Desa		v		Dinas PMD	2025	
40.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengembangan dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Sulawesi Selatan			v		Dinas PMD	2025	
41.	Gerakan Pembangunan Desa (GERBANGDES) Andalan di Sulawesi Selatan	Dalam rangka mewujudkan Desa yang mandiri yang mampu membangun dan memberdayakan Masyarakat desa dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi desa	v		Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Percepatan Pembangunan Perdesaan	Dinas PMD	2025	
42.	Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan		v			Dinas Pendidikan	2025	
43.	Sistem Informasi dan Kearsipan Dinamis	Pelaksanaan Aplikasi Srikandi di	v			Dispus Arsip	2025	

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
- Dokumen ini telah diarsipkan secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



No (1)	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD/Unit Kerja (6)	TARGET PENYAMPALAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
		Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan						
44.	Pedoman Penyelenggaraan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan	Pencerapan alur rujukan di Daerah secara terintegrasi	v			Dinas Kesehatan	2025	
45.	Komunikasi Pimpinan Daerah	Alur, jenis, dan bentuk komunikasi antara pimpinan Daerah dengan pegawai	v			Diskominfo	2025	
46.	Perubahan Ketiga Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Personil Lainnya	Menambahkan atau mempertegas kembali ketentuan Ketua PKK dan anggota PKK sebagai pelaksana perjalanan dinas		v		BKAD	2025	
47.	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah	- Untuk simplifikasi regulasi terkait unit pelaksana teknis - Perubahan beberapa ketentuan yang mengatur tentang: a. nomenklatur, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan uraian tugas UPTD	v			Biro Organisasi	2025	

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1. Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat divalidasi keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



No (1)	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD/Unit Kerja (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
		Pengumpulan dan UPTD ASDP pada Dinas Perhubungan b. Tugas, fungsi, dan uraian tugas UPTD Pusat Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Inang Matutu pada Dinas Sosial nomenklatur, susunan organisasi, tugas, fungsi, uraian tugas, serta Tata Kerja UPTD Labkesda pada Dinas Kesehatan.						
48.	Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan	Pelaksanaan pelayanan Kesehatan rumah oleh orang sakit menyesuaikan dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai		v		Biro Organisasi	2025	

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
- Dokumen ini telah diotomatiskan secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat divalidasi keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



No (1)	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD/Unit Kerja (6)	TARGET PENYAMPALAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
49.	Standar Harga Pemerintah Daerah Tahun 2026	Standar harga 2026	v			BKAD	2025	
50.	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024		v			BKAD	2025	
51.	Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Pelaksanaan arahan Pemerintah Pusat	v			Dinas Koperasi dan UMKM	2025	
52.	Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029		v		Pelaksanaan Kewenangan dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	2025	
53.	Strategi Daerah Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Provinsi Sulawesi Selatan		v		Pelaksanaan dari tugas dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi	Bappelitbangda	2025	
54.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus yang	Menambah ketentuan untuk pemberian bantuan kepada Kabupaten/Kota dalam wilayah		v		BKAD	2025	

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



No (1)	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD/Unit Kerja (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
	Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Provinsi yang terkena bencana						
55	Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemberian Beasiswa	Mengubah syarat dan komponen pembiayaan dalam beasiswa Pemerintah Daerah		v		Biro Kesra	2025	
56.	Perubahan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Secara Terintegrasi (<i>Corporate University</i>)	Ditambahkan pengaturan mengenai pembelajaran di tempat kerja (<i>workplace learning</i>)		v		BPSDM	2025	

an. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,



JUFRI RAHMAN



Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat divalidasi dengan melakukan scan pada QR Code